JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN *LIQUIFIED PETROLEUM* GAS TABUNG 3 KG BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI DESA PANYIURAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nadia[1], Ramona Handayani[2], Selamat Riadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: nadiakunad123@gmail.com

ABSTRAK

Energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjamin akses energi adalah melalui kebijakan subsidi *Liquified Petroleum* Gas tabung 3 kilogram yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Kebijakan tersebut memerlukan pengendalian dan pengawasan yang ketat agar distribusinya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Panyiuran telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi secara tertutup didukung oleh indikator yang berjalan sesuai, yaitu ketersediaan SDM melalui satu pangkalan strategis, sarana dan prasarana memadai berupa armada dan gudang yang aman, dukungan dana operasional, struktur organisasi yang jelas, kompetensi pelaksana dalam menjalankan prosedur, komitmen terhadap keteraturan penyaluran, koordinasi yang cukup efektif, dukungan masyarakat, kondisi ekonomi warga yang membutuhkan subsidi, kondisi geografis daerah yang terjangkau, serta dukungan pemerintah sehingga distribusi relatif tepat waktu dan kebutuhan penerima subsidi dapat terpenuhi. Namun demikian, terdapat indikator yang berjalan kurang baik, yakni kejelasan tujuan yang belum sepenuhnya dipahami, konsistensi dalam pengendalian yang masih dipengaruhi tekanan sosial dari nonpenerima sehingga memicu kebocoran distribusi, tanggung jawab dan kepatuhan yang belum optimal, integritas dalam menjaga distribusi tertutup di tengah keterbatasan pasokan yang menyebabkan ketidakmerataan, serta kejelasan informasi yang masih minim karena sosialisasi hanya dilakukan secara mendadak melalui *WhatsApp* atau saat LPG tiba sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, LPG 3 Kg Bersubsidi, Pengawasan Distribusi, Kebijakan Daerah

ABSTRACT

Energy constitutes a fundamental necessity that plays a vital role in supporting social and economic activities, particularly for low-income households. One form of government intervention to ensure equitable access to energy is the subsidy policy for 3 kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders, which is specifically allocated to poor households

and micro-enterprises. This policy requires strict control and supervision to ensure accurate targeting and to prevent misuse by ineligible parties. This study aims to examine the implementation of Regent Regulation Number 24 of 2021 concerning the Closed Control and Supervision of Subsidized 3 kg LPG Cylinders in Panyiuran Village, South Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors influencing its implementation. The research adopts a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants selected through purposive sampling. The data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Regent Regulation Number 24 of 2021 in Panyiuran Village has generally been carried out effectively. The execution of the closed control and supervision system for subsidized 3 kg LPG cylinders is supported by several well-functioning indicators, including the availability of human resources through a strategically located distribution base, adequate facilities and infrastructure such as transportation vehicles and secure storage warehouses, operational funding support, a clearly defined organizational structure, the competence of implementers in adhering to established procedures, commitment to orderly distribution, relatively effective coordination, community support, the economic conditions of residents who require subsidies, accessible geographical conditions, and governmental support. These factors have contributed to relatively timely distribution and the fulfillment of beneficiaries' needs. Nevertheless, several indicators have not functioned optimally. These include the lack of comprehensive understanding of policy objectives, inconsistency in control mechanisms influenced by social pressure from non-beneficiaries that may trigger distribution leakage, suboptimal levels of responsibility and compliance, limited integrity in maintaining a closed distribution system amid supply constraints resulting in uneven distribution, and insufficient clarity of information dissemination. Socialization efforts are often conducted abruptly through WhatsApp or only upon the arrival of LPG supplies, leading to a suboptimal level of public understanding of the regulation.

Keywords: *Policy Implementation, Subsidized LPG, Distribution Control, Local Government Policy*

PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan dukungan energi yang memadai. Ketersediaan energi yang terjangkau menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin akses energi melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pemberian subsidi energi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Subsidi energi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi sosial dan ekonomi. *Liquified Petroleum* Gas menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan LPG dinilai lebih efisien, praktis, dan ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar konvensional lainnya. Peralihan konsumsi energi menuju LPG merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengelolaan energi berkelanjutan. Kebijakan subsidi LPG tabung 3 kilogram dirancang untuk menjamin akses energi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh proses implementasi di tingkat daerah dan desa.

Liquified Petroleum Gas tabung 3 kilogram merupakan produk energi bersubsidi yang diperuntukkan secara khusus bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Pemerintah

menanggung sebagian besar biaya produksi dan distribusinya agar harga jual tetap terjangkau oleh masyarakat sasaran. Kebijakan ini lahir sebagai kelanjutan dari program konversi minyak tanah ke LPG yang bertujuan mengurangi beban subsidi dan meningkatkan efisiensi energi nasional. Distribusi LPG bersubsidi memerlukan sistem pengendalian yang ketat karena perbedaan harga yang signifikan dengan LPG non-subsidi berpotensi menimbulkan penyimpangan. Fenomena kelangkaan, penimbunan, dan penyaluran tidak tepat sasaran sering muncul di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan kebocoran subsidi kepada kelompok yang tidak berhak. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran. Kebijakan daerah diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pusat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Implementasi kebijakan distribusi LPG harus mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kemampuan aparat pelaksana.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat konsumsi LPG bersubsidi cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah merespons kondisi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup. Peraturan ini bertujuan memastikan LPG bersubsidi hanya diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Sistem distribusi tertutup diterapkan untuk meminimalkan kebocoran subsidi dan meningkatkan akurasi sasaran penerima. Pemerintah desa, agen, dan pangkalan memiliki peran penting dalam memverifikasi data penerima dan mengawasi jalur distribusi. Implementasi kebijakan ini menuntut koordinasi lintas sektor dan komitmen aparat pelaksana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pasokan, distribusi yang tidak merata, serta tekanan sosial terhadap pelaksana kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Desa Panyiuran menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan ini secara empiris.

Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan merupakan wilayah yang menerapkan sistem distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi secara tertutup sesuai ketentuan Peraturan Bupati. Kehadiran satu pangkalan resmi di desa ini menjadi titik sentral pendistribusian LPG kepada masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh LPG bersubsidi pada waktu tertentu. Sosialisasi kebijakan yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur dan kriteria penerima LPG subsidi. Tekanan dari pihak yang tidak berhak juga memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat pangkalan. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2020). Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai tujuan yang ditetapkan. Analisis implementasi kebijakan di tingkat desa diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas regulasi daerah. Temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem distribusi LPG bersubsidi. Kajian ini juga diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam studi implementasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi secara tertutup. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta pemahaman terhadap fenomena kebijakan publik yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Panyiuran

Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai lokasi yang secara langsung menerapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan adanya penerapan sistem distribusi tertutup LPG bersubsidi serta ditemukannya permasalahan distribusi di tingkat desa. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan informan dalam pelaksanaan kebijakan. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebelas orang yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola pangkalan LPG, serta masyarakat penerima manfaat. Karakteristik informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan peran dalam distribusi LPG bersubsidi. Data yang diperoleh dari informan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Keberadaan peneliti di lapangan memungkinkan penggalian data secara mendalam dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses distribusi LPG bersubsidi serta interaksi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, sikap, dan pengalaman informan terkait implementasi kebijakan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan variabel implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan, laporan pendistribusian, dan data penerima LPG bersubsidi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan konsistensi data yang diperoleh di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keakuratan informasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas tabung 3 kilogram bersubsidi secara tertutup di Desa Panyiuran menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran. Standar dan tujuan kebijakan telah ditetapkan secara jelas melalui regulasi yang mengatur kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta tanggung jawab masing-masing pihak pelaksana. Tujuan utama kebijakan diarahkan untuk mencegah kebocoran subsidi dan menjamin ketersediaan LPG bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana kebijakan di tingkat desa telah memahami tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman tersebut tercermin dari penerapan sistem pendataan penerima LPG bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Data penerima disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan bupati. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum terdaftar namun merasa berhak memperoleh LPG bersubsidi. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan sosial terhadap aparat desa dan pengelola pangkalan. Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan standar kebijakan menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan. Standar kebijakan pada dasarnya telah memadai, namun konsistensi penerapannya masih memerlukan penguatan.

Sumber daya merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian LPG bersubsidi di Desa Panyiuran. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan meliputi aparat pemerintah daerah, pemerintah desa,

agen, dan pengelola pangkalan LPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelaksana kebijakan relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penerima manfaat. Keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada pengawasan distribusi yang belum optimal. Sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan subsidi pemerintah pusat. Keterbatasan pasokan LPG bersubsidi pada waktu tertentu menjadi kendala yang sering dirasakan masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung distribusi LPG di tingkat pangkalan dinilai cukup memadai, namun belum sepenuhnya menunjang sistem distribusi tertutup secara optimal. Ketersediaan data penerima manfaat menjadi bagian penting dari sumber daya informasi. Data yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Penguatan kapasitas pelaksana kebijakan menjadi kebutuhan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Karakteristik organisasi pelaksana turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan LPG bersubsidi di Desa Panyiuran. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendata dan memverifikasi penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Agen dan pangkalan LPG berfungsi sebagai pelaksana teknis distribusi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah terbentuk dengan pembagian tugas yang relatif jelas. Koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola pangkalan berjalan cukup baik dalam proses pendataan dan penyaluran LPG. Permasalahan muncul ketika pelaksana kebijakan dihadapkan pada tekanan sosial dari masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Karakteristik pelaksana yang berada dekat dengan masyarakat menyebabkan kebijakan sulit diterapkan secara tegas. Kondisi tersebut memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Organisasi pelaksana membutuhkan dukungan kebijakan lanjutan agar mampu menjalankan tugas secara profesional. Penguatan regulasi teknis di tingkat desa dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi pelaksana. Karakteristik organisasi yang adaptif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam implementasi pengendalian LPG bersubsidi secara tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola pangkalan telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi rutin. Informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana melalui pertemuan dan penyampaian surat edaran. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme distribusi LPG bersubsidi secara tertutup. Ketidaktahuan tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kejelasan informasi sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan konflik sosial di tingkat desa. Pelaksana kebijakan membutuhkan strategi komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Penyampaian informasi yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan. Komunikasi yang baik menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan publik (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2020).

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Panyiuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksana kebijakan memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai ketentuan. Pelaksana memahami bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat utama. Sikap positif pelaksana tercermin dari upaya menjaga ketertiban distribusi LPG di pangkalan. Kendala muncul ketika pelaksana dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Pelaksana kebijakan berada dalam posisi yang rentan karena hubungan sosial yang dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut memengaruhi ketegasan dalam penerapan

kebijakan. Disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya tegas menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat sikap pelaksana kebijakan. Penguatan komitmen dan integritas pelaksana menjadi aspek penting dalam keberlanjutan kebijakan. Sikap pelaksana yang konsisten akan meningkatkan efektivitas kebijakan di tingkat lapangan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Desa Panyiuran turut memengaruhi implementasi kebijakan pengendalian LPG bersubsidi. Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor informal meningkatkan ketergantungan terhadap LPG bersubsidi. Kebutuhan LPG yang tinggi menyebabkan persaingan antar masyarakat dalam memperoleh LPG bersubsidi. Tekanan ekonomi mendorong masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tetap berupaya mendapatkan LPG bersubsidi. Lingkungan sosial yang bersifat komunal memengaruhi hubungan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat. Norma sosial dan rasa solidaritas sering kali menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan politik di tingkat desa relatif stabil dan tidak menunjukkan konflik yang signifikan terkait kebijakan ini. Dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan cukup kuat melalui regulasi dan pengawasan. Faktor lingkungan secara keseluruhan memberikan pengaruh yang kompleks terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi. Penyesuaian kebijakan dengan karakteristik lingkungan lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Panyiuran menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas dalam regulasi daerah. Kebijakan ini secara eksplisit menetapkan sasaran penerima LPG tabung 3 kilogram bersubsidi, yaitu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utama kebijakan diarahkan untuk mengendalikan distribusi LPG agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa dan pengelola pangkalan pada umumnya memahami tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman ini tercermin dari upaya pendataan penerima LPG bersubsidi yang dilakukan secara administratif oleh pemerintah desa. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara standar kebijakan dan kondisi sosial masyarakat. Sebagian masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat tetap mengharapkan akses terhadap LPG bersubsidi. Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi pelaksana kebijakan di tingkat desa. Standar kebijakan secara normatif sudah memadai, namun implementasinya menghadapi tantangan sosial yang cukup kompleks. Tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat potensi ketidaktepatan sasaran distribusi.

Penjelasan lebih rinci terkait standar dan tujuan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut.

- Kebijakan menetapkan kriteria penerima LPG bersubsidi berdasarkan kondisi ekonomi dan jenis usaha masyarakat.
- Sistem distribusi tertutup diterapkan untuk membatasi akses LPG hanya kepada masyarakat yang terdaftar.
- Pemerintah desa berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan validasi data penerima.
- Tujuan kebijakan berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok masyarakat miskin.
- Tantangan utama muncul dari tekanan sosial masyarakat yang merasa memiliki hak yang sama terhadap LPG bersubsidi.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian LPG bersubsidi di Desa Panyiuran. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari aparat pemerintah daerah, pemerintah desa, agen, dan pengelola pangkalan LPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pengawasan di lapangan. Keterbatasan tersebut berdampak pada pengawasan distribusi LPG yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Sumber daya finansial dalam kebijakan ini sepenuhnya bergantung pada alokasi subsidi dari pemerintah pusat. Ketersediaan LPG bersubsidi tidak selalu stabil sehingga memicu keluhan masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung distribusi dinilai cukup memadai, namun belum sepenuhnya mendukung sistem distribusi tertutup yang ideal. Sumber daya informasi berupa data penerima manfaat masih memerlukan pembaruan secara berkala. Ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Penjabaran sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi.

- Sumber daya manusia pelaksana kebijakan masih terbatas jumlahnya.
- Beban kerja pelaksana cukup tinggi karena harus melayani masyarakat secara langsung.
- Ketersediaan LPG bersubsidi bergantung pada distribusi dari agen.
- Sarana pangkalan LPG telah tersedia namun belum dilengkapi sistem pengawasan berbasis teknologi.
- Data penerima LPG bersubsidi masih bersifat administratif dan memerlukan pemutakhiran rutin.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan LPG bersubsidi di Desa Panyiuran. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pihak yang berwenang dalam pendataan dan pengawasan penerima manfaat. Pengelola pangkalan LPG bertindak sebagai pelaksana teknis distribusi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah terbentuk dengan pembagian tugas yang cukup jelas. Koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola pangkalan berjalan relatif baik dalam proses distribusi LPG. Permasalahan muncul ketika organisasi pelaksana menghadapi tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Kedekatan sosial antara pelaksana dan masyarakat memengaruhi ketegasan dalam penerapan kebijakan. Karakteristik organisasi yang berada di tingkat lokal menyebabkan pelaksanaan kebijakan rentan terhadap kompromi. Kondisi tersebut berdampak pada konsistensi implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana membutuhkan dukungan kebijakan teknis yang lebih kuat. Penguatan kelembagaan di tingkat desa menjadi kebutuhan penting.

Karakteristik organisasi pelaksana dapat dijelaskan melalui poin-poin berikut.

- Pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan daerah dan masyarakat.
- Pengelola pangkalan LPG berinteraksi langsung dengan penerima manfaat.
- Struktur organisasi bersifat sederhana dan berbasis hubungan sosial.
- Tekanan sosial memengaruhi profesionalitas pelaksana kebijakan.
- Ketiadaan sanksi tegas di tingkat lokal melemahkan daya paksa kebijakan.

Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pengendalian LPG bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola pangkalan telah dilakukan melalui

koordinasi rutin. Informasi kebijakan disampaikan melalui sosialisasi dan pertemuan formal. Sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya menjangkau seluruh penerima manfaat. Sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme distribusi LPG secara tertutup. Ketidakjelasan informasi menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi negatif terhadap kebijakan. Komunikasi yang kurang efektif memicu keluhan dan ketidakpuasan masyarakat. Pelaksana kebijakan membutuhkan strategi komunikasi yang lebih intensif. Penyampaian informasi secara transparan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat. Komunikasi yang baik memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan. Kegagalan komunikasi berpotensi menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi.

- Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- Penyampaian informasi kebijakan kepada pengelola pangkalan.
- Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat penerima manfaat.
- Kejelasan informasi mengenai kriteria dan mekanisme distribusi.
- Transparansi dalam penyampaian kebijakan kepada publik.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana kebijakan memengaruhi secara langsung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Panyiuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki sikap yang cukup positif terhadap kebijakan tersebut. Pelaksana memahami tujuan kebijakan sebagai upaya melindungi masyarakat miskin. Komitmen pelaksana terlihat dari upaya menjaga ketertiban distribusi LPG di pangkalan. Kendala muncul ketika pelaksana menghadapi tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Hubungan sosial yang dekat memengaruhi ketegasan pelaksana. Pelaksana berada dalam dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan menjaga keharmonisan sosial. Disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya tegas menjadi hambatan implementasi kebijakan. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat posisi pelaksana. Penguatan komitmen dan integritas pelaksana menjadi aspek penting. Sikap pelaksana yang konsisten akan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Disposisi pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pelaksana memahami tujuan dan manfaat kebijakan.
- Komitmen pelaksana cukup baik dalam pelaksanaan teknis.
- Tekanan sosial memengaruhi ketegasan pelaksana.
- Tidak semua pelaksana berani menolak permintaan masyarakat yang tidak berhak.
- Dukungan kebijakan diperlukan untuk memperkuat sikap pelaksana.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Desa Panyiuran memengaruhi implementasi kebijakan LPG bersubsidi. Kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal meningkatkan kebutuhan terhadap LPG bersubsidi. Keterbatasan pendapatan mendorong masyarakat untuk mengakses LPG bersubsidi meskipun tidak memenuhi kriteria. Lingkungan sosial yang bersifat komunal memengaruhi hubungan antara pelaksana dan masyarakat. Solidaritas sosial sering menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan politik desa relatif stabil dan tidak menunjukkan konflik signifikan. Dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan cukup kuat. Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang kompleks terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat memerlukan pendekatan yang sensitif. Penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal menjadi penting. Lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas tabung 3 kilogram bersubsidi secara tertutup di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum telah berjalan dengan baik. Kebijakan ini telah dilaksanakan dengan mengacu pada standar dan tujuan yang ditetapkan dalam regulasi daerah, khususnya dalam upaya memastikan LPG bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah desa dan pengelola pangkalan telah berperan aktif dalam melakukan pendataan serta pendistribusian LPG bersubsidi. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung program subsidi energi. Sistem distribusi tertutup mampu mengurangi potensi penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Implementasi kebijakan memberikan dampak positif terhadap keteraturan distribusi LPG di tingkat desa. Ketersediaan LPG bersubsidi relatif terjaga meskipun pada waktu tertentu masih terjadi keterbatasan pasokan. Kebijakan ini menunjukkan relevansi yang tinggi dalam melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan kebijakan masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan dan konsistensi penerapan aturan. Implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala struktural dan sosial di lapangan.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan LPG bersubsidi di Desa Panyiuran meliputi aspek sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat. Keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang kompeten serta keterbatasan pasokan LPG, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Selain itu, tekanan sosial dari sebagian masyarakat yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat turut memengaruhi ketegasan dan konsistensi pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Komunikasi kebijakan yang belum tersampaikan secara merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara utuh mekanisme distribusi LPG bersubsidi yang bersifat tertutup dan berbasis pada kriteria tertentu. Hal ini berdampak pada munculnya persepsi yang kurang tepat serta potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Karakteristik organisasi pelaksana yang cenderung berbasis pada hubungan sosial dan kedekatan lokal juga memengaruhi konsistensi dalam penerapan kebijakan, terutama ketika harus berhadapan dengan dinamika sosial yang kompleks. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan pada dasarnya menunjukkan komitmen yang positif terhadap pelaksanaan program, namun dalam praktiknya mereka sering menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap regulasi dan upaya menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat yang bersifat komunal. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang relatif belum stabil semakin meningkatkan tingkat ketergantungan terhadap LPG bersubsidi sebagai kebutuhan pokok rumah tangga. Lingkungan sosial yang erat dan saling terhubung turut memengaruhi dinamika implementasi kebijakan, baik dalam bentuk dukungan maupun tekanan sosial. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan LPG bersubsidi di Desa Panyiuran. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat desa. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta optimalisasi fungsi pengawasan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2018). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Buku. Bandung: Alfabeta.

Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Buku. Bandung: Alfabeta.

Leo Agustino. (2020). Dasar-dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta

Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Buku. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2015). Teori Implementasi Kebijakan. Buku. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendirian Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Buku. Bandung: Alfabeta.

Tahir. (2014). Kebijakan Publik dan Implementasi. Buku. Jakarta: Rajawali Pers.